

**KLASIFIKASI REZIM HUKUM DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM SERTA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PELAKU USAHA *FLOATING STORAGE UNIT*
(FSU) YANG BERSIFAT *BUSINESS-TO-BUSINESS* (B2B) DI
WILAYAH LAUT INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

Koesmoeryantati

2340058039



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga - lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan :

Nama : Koesmoeryantati
NIM : 2340058039
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang Bersifat *Business-to-Business* (B2B) di Wilayah Laut Indonesia”** adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 01 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Kesmoeryantati

NIM: 2340058039



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum
Serta Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha *Floating Storage Unit* (FSU)
yang Bersifat *Business-to-Business* (B2B) di Wilayah Laut Indonesia**

Oleh:

Nama : Koesmoeryantati
NIM : 2340058039
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta,/..../20..

Menyetujui:

Pembimbing I,

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati,
S.H., M.Hum

(5759741642230062)

Pembimbing II,

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H.,
M.H

(5434757658137093)

Ketua Program Studi Hukum,

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati,
S.H., M.Hum

(5759741642230062)

Pjs. Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang,
S.H., M.H

(0557759660138022)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal ...1./7./2016... telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Koesmoeryantati
NIM : 2340058039
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Floating Storage Unit (FSU) yang Bersifat Business-to-Business (B2B) di Wilayah Laut Indonesia”** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

Assoc. Prof. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H.	Ketua	
--	-------	--

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Anggota	
---	---------	--

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Anggota	
---------------------------------	---------	--



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koesmoeryantati
NIM : 2340058039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang Bersifat *Business-to-Business* (B2B) di Wilayah Laut Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 01 Juli 2026

Koesmoeryantati
NIM: 2340058039

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum serta Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang Bersifat *Business-to-Business* (B2B) di Wilayah Laut Indonesia." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bimbingan, doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu tercinta, yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Penulis mempersembahkan penyelesaian skripsi ini sebagai bentuk penghormatan atas cinta dan perjuangan mereka, serta sebagai wujud pemenuhan pesan Almarhumah Ibu agar penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor III Universitas Kristen Indonesia, yang pada saat penulis memulai pendidikan hingga tahap Seminar Proposal menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian, dukungan, arahan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pejabat Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dukungan

dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta koreksi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh staf administrasi dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu kelancaran proses akademik penulis.
7. Putra tercinta, Dimar, yang dengan kasih sayang, pengertian, doa, dan dukungannya telah menjadi sumber kekuatan serta inspirasi bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian ini menjadi teladan bahwa proses belajar tidak mengenal batas usia dan tidak pernah mengenal kata terlambat.
8. Kakak-kakak tercinta, Mbak I-ien, Mbak Novie, dan Mbak Nana, serta adik-adik tercinta, Dayan dan Indra, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan moril maupun materiel, serta semangat yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan K-23, yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan, khususnya Ibu Liny Tanto, Ibu Dwi Dyah Mumpuni, dan Bapak Adi Suwanto, atas persahabatan, kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis sejak kecil, Kapten Aliot dan Bapak Robert, yang telah memperkenalkan serta mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tanpa dorongan, dukungan, dan kepercayaan yang mereka berikan, perjalanan akademik ini mungkin tidak akan pernah dimulai.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi dan hukum minyak dan gas bumi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 01 Juli 2026

Penulis,

Koesmoeryantati
NIM: 2340058039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Kerangka Teori.....	20
1. Teori Kepastian Hukum	20
2. Teori Perlindungan Hukum	22

B. Tinjauan Umum Kerangka Konsep.....	24
1. Minyak dan Gas Bumi	24
2. Rezim Hukum	32
3. Pelaku Usaha.....	34
4. Tinjauan Umum <i>Floating Storage Unit</i> (FSU)	39
5. Tinjauan Umum <i>Business-to-Business</i> (B2B).....	44
6. Tinjauan Umum Wilayah Laut.....	50
BAB III.....	60
REZIM HUKUM YANG TEPAT TERHADAP KEGIATAN USAHA <i>FLOATING STORAGE UNIT</i> (FSU) YANG BERSIFAT <i>BUSINESS-TO-BUSINESS</i> (B2B) DI WILAYAH LAUT INDONESIA	60
A. Kasus Posisi dalam Penelitian	60
1. Karakteristik Operasional FSU	60
2. Permasalahan Hukum dalam Kegiatan FSU	62
B. Analisis Karakteristik Kegiatan <i>Floating Storage Unit</i> (FSU).....	65
1. Analisis Fungsi FSU (Penyimpanan vs. Niaga).....	66
2. Analisis Operasional FSU	69
3. Analisis Model <i>Business-to-Business</i> (B2B)	70
4. Posisi FSU dalam Sistem Logistik Energi	71
C. Klasifikasi Rezim Hukum Terhadap Kegiatan Usaha <i>Floating Storage Unit</i> (FSU).....	73
1. Dalam Rezim Hukum Minyak dan Gas Bumi	73
2. Dalam Rezim Hukum Pelayaran.....	77
3. Persinggungan Rezim Hukum dalam Praktik	78
4. Penentuan Rezim Hukum yang Tepat	80
D. Ketidakkonsistenan Klasifikasi oleh Pemerintah.....	83
1. Ketidakkonsistenan Klasifikasi dalam Praktik.....	84
2. Dasar hukum yang Digunakan Masing-Masing Instansi	84
3. Letak Kekeliruan dalam Klasifikasi.....	86

4. Analisis Terhadap Dasar Penilaian Otoritas (Studi Kasus Penghentian Kegiatan Usaha FSU)	87
5. Dampak Ketidakkonsistenan Terhadap Kegiatan Usaha FSU	89
E. Analisis Kritis dan Pendekatan Hukum	91
1. Disharmonisasi Antar Rezim Hukum.....	91
2. Fragmentasi Kewenangan	92
3. Analisis dalam Prespektif Hukum Progresif.....	93
F. Penegasan Rezim Hukum yang Tepat.....	96
BAB IV	98
KLASIFIKASI REZIM HUKUM TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA <i>FLOATING STORAGE</i> UNIT (FSU).....	98
A. Klasifikasi Rezim Hukum terhadap Kegiatan <i>Floating Storage Unit</i> (FSU) yang Bersifat <i>Business-to-Business</i> di Wilayah Laut Indonesia	98
1. Karakteristik Operasional Kegiatan <i>Floating Storage Unit</i> (FSU).....	98
2. Analisis Kegiatan FSU dalam Perspektif Kegiatan Usaha Hilir Migas....	100
3. Keterkaitan Rezim Hukum Pelayaran terhadap Operasional FSU	104
4. Persinggungan Rezim Hukum dalam Kegiatan FSU	106
5. Analisis terhadap Praktik Pengaturan dan Perizinan FSU di Indonesia ...	108
B. Implikasi Klasifikasi Rezim Hukum terhadap Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha FSU	112
1. Kepastian Hukum dalam Penentuan Klasifikasi Kegiatan FSU	112
2. Ketidakkonsistenan Penerapan Hukum terhadap Kegiatan FSU	115
3. Implikasi Ketidakpastian Hukum terhadap Pelaku Usaha.....	117
C. Implikasi Klasifikasi Rezim Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha FSU	120
1. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Pelaku Usaha FSU	120
2. Perlindungan Hukum Represif terhadap Pelaku Usaha FSU	122
3. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penghentian Operasional Kegiatan FSU.	126

D. Hasil Analisis dan Penemuan Hukum.....	129
BAB V.....	133
PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Rekomendasi.....	134
DAFTAR PUSTAKA	137



ABSTRAK

- A. Nama : Koesmoeryantati
B. NIM : 2340058039
C. Bagian : Hukum Ekonomi
D. Judul : Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang Bersifat *Business-to-Business* (B2B) di Wilayah Laut Indonesia
E. Halaman : xv + 136 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : *Floating Storage Unit* (FSU), Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum
G. Ringkasan Isi :

Kegiatan *Floating Storage Unit* (FSU) merupakan bagian dari sistem logistik energi yang berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan terapung tanpa melakukan jual beli maupun peralihan kepemilikan komoditas. Dalam praktiknya, operasional FSU berada pada persinggungan beberapa rezim hukum, yaitu rezim migas, pelayaran, kepelabuhanan, serta pemanfaatan ruang laut. Persinggungan ini menimbulkan perbedaan penafsiran antarinstansi mengenai klasifikasi kegiatan FSU, khususnya apakah FSU merupakan kegiatan penyimpanan atau kegiatan niaga migas. Perbedaan penafsiran tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi tindakan administratif yang tidak konsisten, sebagaimana terlihat pada kasus penghentian operasional FSU di Batam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum migas, pelayaran, kelautan, serta praktik administratif yang diterapkan terhadap kegiatan FSU. Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum untuk menilai konsistensi penerapan regulasi serta jaminan perlindungan bagi pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif kegiatan FSU lebih tepat diklasifikasikan sebagai kegiatan penyimpanan dalam rezim usaha hilir migas. Rezim pelayaran dan kepelabuhanan hanya berfungsi sebagai rezim teknis operasional, bukan sebagai dasar penentuan klasifikasi usaha. Penetapan klasifikasi yang tepat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah disharmonisasi regulasi, serta memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi pelaku usaha FSU.

- H. Daftar Acuan : 25 Buku + 10 Perundang-undangan/Peraturan + 25 Jurnal/Artikel
I. Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
Dosen Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H

Jakarta, 01 Juli 2026

Penulis,

Koesmoeryantati

ABSTRACT

- A. Name : Koesmoeryantati
B. NIM : 2340058039
C. Section : Economic Law
D. Title : *Classification of Legal Regimes and Their Implications for Legal Certainty and Legal Protection for Business-to-Business (B2B) Floating Storage Unit (FSU) Operators in Indonesian Maritime Zones*
E. Page : xv + 136 Pages + Bibliography
F. Keywords : Floating Storage Unit (FSU), Legal Certainty, Legal Protection
G. Summary of Contents :

The Floating Storage Unit (FSU) is part of the energy logistics system that functions as a floating storage facility without engaging in the sale, purchase, or transfer of ownership of commodities. In practice, FSU operations intersect with several legal regimes, including oil and gas law, maritime law, port administration, and marine spatial utilization. These intersections create differing interpretations among government agencies regarding whether FSU activities constitute storage or downstream oil and gas trading, resulting in legal uncertainty and the potential for inconsistent administrative actions, as reflected in the suspension of FSU operations in Batam.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis examines the regulatory framework governing oil and gas, maritime affairs, marine utilization, and administrative practices applied to FSU operations. Theories of legal certainty and legal protection are used to assess the consistency of regulatory implementation and the extent of protection afforded to business actors.

The findings show that FSU activities are substantively more appropriate to classify as storage within the downstream oil and gas regime. Maritime and port regulations function only as technical operational regimes and do not determine business classification. Accurate classification is essential to ensure legal certainty, prevent regulatory disharmony, and provide proportional legal protection for FSU operators.

- H. Bibliography : 25 Books + 10 Laws/Regulations + 25 Jurnal/Articles
I. Academic Supervisor I : Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
Academic Supervisor II : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H

Jakarta, 01 Juli 2026

Writer,

Koesmoeryantati
NIM: 2340058039